

Hubungan Timbal Balik Antar Desa Adat dan Pariwisata

Ni Gusti Ayu Kartika
Dosen Program Studi Penerangan Hindu, Fakultas Dharma Duta,
IHDN Denpasar
Email: ayukartikanigusti@gmail.com

Abstrak

Desa adat Bali mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan pariwisata budaya. semua orang memaklumi bahwa daya tarik Bali terhadap wisatawan, tidaklah semata karena keindahan alamnya, lebih dari pada itu adalah budayanya yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan memantapkan peranan, fungsi,dan wewenang Desa adat, maka sesungguhnya semua aspek budaya yang didukung oleh masyarakat Bali akan menjadi daya tarik kepariwisataan yang bila dipelihara dan dikembangkan dengan baik akan menjamin kalangsungan kehidupan pariwisata. Dalam Desa adat berkembang seni budaya, kehidupan masyarakat yang sejahtera, pengamalan ajaran agama dalam prilaku dan aktivitas ritual agama yang senantiasa akan menarik wisatawan sepanjang masa. Di samping itu Desa adat berperanan pula dalam pengembangan kawasan wisata, mengawasi penyalah gunaan simbol-simbol keagamaan dan juga berperanan dalam mencegah pendatang liar yang masuk ke Bali, utamanya di wilayah palemahan Desa adat di Bali.

Pendahuluan

Hakekat dari suatu kebudayaan dan masyarakat adalah adanya dinamika tertentu dengan unsur-unsurnya yang tidak statis. Tantangan bagi generasi yang satu yang belum tentu sama dengan generasi brikutnya menyebabkan terjadinya perubahan, yang mencerminkan proses pemilihan terhadap unsur-unsur budaya yang disesuaikan dengan konteks kepentingan tertentu. Belum lagi terhitung kemajuan teknologi atau perwujudan upaya penduduk menanggapi tantangannya dalam proses adaptasi terhadap masyarakat akan berubah baik karena kekuatan dari dalam masyarakat maupun karena kekuatan dari luar lebih-lebih dengan adanya kontak dengan pariwisata.

Secara historis, pariwisata di daerah Bali telah berawal sejak tahun 1920, tatkala perusahaan perkapalan Belanda KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) dengan jalan memprogandakan pulau Bali berhasil menarik penumpang-penumpang Eropa untuk berkunjung ke daerah ini. KPM berangsur-angsur dapat memanfaatkan Bali untuk kepentingan perusahaannya, kemudian mendirikan hotel dan pesanggrahan di pulau ini untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang asing yang merupakan tamu-tamu KPM sendiri (pendit, 1965;Mantra, 1993). Kemudian sejak tahun 1969, pariwisata di Bali makin berkembang ke arah *mass-tourism* sebagai konsekuensi dari makin mantapnya penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas kepariwisataan dan dibukanya Bandar Udara Ngurah Rai dalam mata rantai penerbangan internasional.

Dalam kaitan ini makin meningkat pula jumlah orang Bali yang memperoleh pekerjaan di sektor pariwisata, makin meningkat pula desa-desa adat yang dikunjungi wisatawan dan makin meningkat pula komunikasi dan keterbukaan masyarakat dan kebudayaan Bali terhadap pariwisata. Dari sejarah perkembangan kepariwisataan di Bali selama tiga perempat abad (1920-1999) hasil survei tentang hal-hal yang menarik wisatawan selama tinggal di Bali menunjukkan mereka yang tertarik kepada unsur kebudayaan (61,78%) disusul keindahan alam fauna dan flora (32,8%), hal-hal lain (5,37%).

Semua desa di Bali yang terikat dalam sistem sosial budaya yang disebut *desa adat* atau *desa pakraman*, memiliki kearifan lokal dan *local genius* yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa bertahan, tumbuh dan berkembang karena dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati yang disebut *desa mawacara* dan *desa, kala, patra*.

Motivasi pariwisata budaya telah menggerakkan para pelaku pariwisata untuk memperhatikan keberlanjutan usaha pariwisata sebagai bagian dari kehidupannya. Bali tetap mengandalkan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan peluang dan kesempatan kerja, dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep pengembangan pariwisata budaya di daerah Bali tersirat cita-cita adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara selaras, serasi dan seimbang.

Dengan memahami kebijakan pengembangan pariwisata budaya maka bisa dilihat bahwa pembangunan pariwisata Bali telah berperan dalam pertumbuhan perekonomian Bali serta mendinamisasikan kehidupan sosial budaya. Bali sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pariwisata sejak beberapa dasawarsa terakhir. Ekonomi, seperti misalnya matapencarian dalam sector pariwisata, sejalan dengan Tjatera (2007), Spillane (1994), sebagai salah satu aspek kehidupan masyarakat Bali yang terkemas dalam budaya, di mana mata pencarian tersebut digeluti, karena masyarakat selalu melakukan adaptasi pada lingkungannya.

Tidak berlebihan rasanya, jika setiap membicarakan Bali, baik dari segi ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, lingkungan dan sumber daya alam atau pembangunan secara umum, pariwisata selalu menjadi “*agent*” atau “*aktor*” yang memainkan peranan yang sangat penting. Sebaliknya setiap orang membicarakan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional, Bali selalu dijadikan acuan, dibahas, dianalisis, dan selalu menjadi *exemplary case* (Pitana: 2000, hal. 4).

Didasari sepenuhnya bahwa Desa Adat adalah merupakan pilar penyangga utama kebudayaan Bali, dan telah banyak mendukung keberhasilan pembangunan dalam berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Namun perlu dipertanyakan apakah hubungan antara desa adat sebagai pilar penyangga kebudayaan Bali sudah simetris dengan pariwisata. Dan hendaknya disadari bahwa hubungan akan terjadi apabila ada unsur memberi dan menerima (*reciprocity*) tanpa itu hubungan tidak akan langgeng.

Pembahasan

Desa Adat yang ada saat sekarang tentunya tidak dibangun dengan seketika dan tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses yang sangat panjang dari zaman dari abad ke abad. Bali sebenarnya telah mengenal masyarakat desa yang disebut *kraman*

(dalam prasasti ditulis keraman), dan itu muncul pertama dalam prasasti Dausa, pura bukit Indrakila tahun 942 M. Pada prasasti itu disebut nama Raja Paduka Haji Ugrasena (prasasti Bali I, 1954) : 71-72). Untuk menunjukkan desa digunakan istilah wanua, atau banua seperti tercatat dalam prasasti Desa Trunyan B tahun 911 M. Dapat diduga bahwa wujud desa pada masa itu lebih merupakan cikal bakal atau keturunan pendiri pemukiman yang sejak awal telah mendiami daerah tertentu, ada kelompok pengurus atau *Prajuru* desa yang ditunjuk dari antara warga desa, bila ada raja maka kekuasaannya tidak masuk mencampuri keadaan di Desa (Parimartha, 1998).

Selanjutnya penataan Desa Adat di Bali menyatakan bahwa desa-desa di Bali bersifat otonom, memiliki kekayaan, aturan sendiri dan lepas dari kekuatan lain. Dengan demikian desa Bali yang dinyatakan otonom, memiliki hukum-hukum sendiri telah dipelajari semakin luas. Studi Korn mengenai hukum adat yang menghasilkan buku *Het Adatrecht Van Bali* (1932) tampak membuat desa semakin terkenal dengan hukum adat yang dilekatkan padanya, memberi gambaran desa Bali yang harmonis tanpa campur tangan kekuasaan luar.

Menurut Perda Nomor 06 Tahun 1986, yang mengatur tentang konsep atau pengertian Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun menurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* (*Kahyangan desa*) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Sesuai dengan hakikat pengertian otonomi desa sebagai kekuasaan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri maka sudah jelas bahwa pelaksanaan kekuasaan seperti itu berlaku dalam wilayah desa yang bersangkutan. Mengenai kekuasaan seperti itu berlaku dalam wilayah desa yang bersangkutan. Mengenai kekuasaan desa adat, hingga saat ini dapat dibedakan atas 3 macam kekuasaan, yaitu : kekuasaan desa adat, hingga saat ini dapat dibedakan atas 3 macam kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa (*paruman* atau *Sangkepan desa*), seperti untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat baik dalam hubungan antara masyarakat sendiri, hubungan masyarakat dengan alam lingkungannya maupun anggota masyarakat dengan sang Maha Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa) yang dikenal dengan filsafat *Tri Hita Karana*.
2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius, seperti membina dan mengembangkan nilai-nilai agama Hindu dan kaedah adat *dresta*, mengembangkan kebudayaan, memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa.
3. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan yang menyimpang darri aturan yang telah ditetapkan yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat. (Widnyana, 1988).

Dalam bidang ekonomi sebenarnya desa adat mempunyai kekuasaan untuk mengatur kekayaan desa adat. Apalagi dalam konteks perkembangan pariwisata, yang akan memberikan inspirasi untuk menerapkan konsep pariwisata budaya di Bali. Dengan konsep ini kepariwisataan dikembangkan atas modal dan daya dukung utama yang dimiliki daerah ini yaitu kebudayaan Bali. Implikasi dari itu kemudian memberi petunjuk bahwa interaksi antara pariwisata dengan kebudayaan Bali dan Desa Adat sebagai pilar utama penyangga kebudayaan secara ideal seharusnya dapat berlangsung secara intensif, positif dan saling menguntungkan.

Masyarakat Bali yang tradisional dan penghidupannya yang bersifat agraris tampak sebagai satu kesatuan yang utuh, kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan kelompok dan individu sebagai warga masyarakat. Warga masyarakat satu dengan yang lainnya terikat berdasarkan ikatan solidaritas mekanis dan dalam masyarakat demikian, dunia kehidupan masih menyatu. Jika terjadi suatu perselisihan antar warga, masyarakat berusaha menyelesaiannya secara musyawarah mufakat (konsensus) berdasarkan pada asas kepatutan melalui lembaga *Sangkepan*. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat dalam forum *Sangkepan* tersebut berfungsi untuk mengembalikan masyarakat ke dalam suasana kehidupan yang rukun dan damai (harmonis).

Suasana kehidupan harmonis, pada masyarakat tradisional yang tersebut, kini tampaknya telah berubah karena pengaruh modernisasi, industrialisasi dan lebih-lebih lagi setelah masyarakat mengalami proses globalisasi. Kehidupan non agraris dan globalisasi tersebut telah mengubah masyarakat homogen menjadi masyarakat majemuk (plural) yang di dalamnya terdapat suasana kehidupan yang heterogen.

Di Bali, proses globalisasi telah dirasakan jauh sebelum masyarakat Indonesia lainnya mengalami hal tersebut. salah satu penyebab terjadinya proses globalisasi lebih awal di daerah ini adalah karena perkembangan pariwisata yang telah berlangsung sejak lama. Suasana demikian, mencerminkan diferensiasi dalam berbagai bidang antara lain dalam pekerjaan, profesi, pendidikan dan kepentingan. Kemajemukan masyarakat dapat juga dilihat dari tumbuhnya berbagai kelompok dan hubungan sosial baru yang timbul sebagai tuntutan kehidupan dunia modern.

Kelompok-kelompok sosial baru tersebut umumnya menganut nilai dan norma serta kebiasaan yang berbeda dengan nilai, norma, serta kebiasaan masyarakat tradisional. Kelompok-kelompok tsb. juga mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan sering kali juga bertentangan. Dalam suasana demikian, masyarakat tidak lagi digambarkan sebagai suatu kesatuan yang utuh melainkan terdiri dari bagian-bagian dan justru bagian-bagian inilah yang lebih menonjol dari masyarakat secara keseluruhan. Solidaritas mekanis yang semula menjadi daya pengikat dalam masyarakat digantikan oleh ikatan solidaritas organis yang lebih menonjolkan ikatan dalam kelompok dan kepentingan kelompok masing-masing lebih diutamakan dibandingkan masyarakat secara keseluruhan. Orientasi nilai warga masyarakat dalam pergaulan antar sesama pun tampak mengalami pergeseran dari nilai kebersamaan ke nilai individual dan komersial. Situasi demikian memberi peluang untuk timbulnya persaingan dan konflik.

Banyak hal yang muncul sebagai sumber konflik dewasa ini antara lain: tanah, status sosial (prestise), jabatan dan peluang kerja. Di Bali, sumber konflik yang paling menonjol dewasa ini adalah, tanah, baik tanah milik perorangan, milik kolektif, milik pura atau milik Desa adat dan tak terkecuali tanah untuk penguburan. Sebelum keadaan masyarakat seperti sekarang ini, konflik yang terjadi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh lembaga penyelesaian konflik, baik ditingkat keluarga atau kerabat maupun di tingkat masyarakat. Konflik-konflik yang timbul dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat (konsensus) ataupun perundingan (negosiasi). Cara penyelesaian demikian benar-benar dapat mengakhiri suasana konflik antara kedua belah pihak yang berselisih, sehingga mereka dapat rukun kembali. Berbeda keadaannya dengan situasi sekarang, konflik yang terjadi di masyarakat sering kali tidak dapat diselesaikan berdasarkan prosedur dan kebiasaan yang berlaku. Kalaupun ada upaya penyelesaian terhadap konflik yang terjadi namun sering kali penyelesaiannya dirasakan tidak memuaskan para pihak sehingga konflik tetap berlangsung berlarut-larut. Ini berarti cara-cara penyelesaian konflik adat mengalami tantangan.

Proses globalisasi telah membuka masyarakat Bali, termasuk masyarakat pedesaan ke dalam pergaulan luas pada pergaulan dunia. Hal ini ternyata telah menimbulkan banyak tantangan bagi masyarakat adat, termasuk lembaga-lembaga adatnya terutama dalam menjalankan fungsinya. Tantangan yang dihadapi tersebut antara lain telah terjadinya perubahan nilai orientasi warga masyarakat dalam bersikap dan bertindak, keefektifan *awig-awig* sebagai alat kontrol sosial berkurang, keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian konflik di masyarakat yang dahulu umumnya ditaati kini tidak jarang diabaikan karena dipandang tidak memuaskan. Penggunaan tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penggunaan tanah yang dahulu jarang menimbulkan konflik, sekarang tanah menjadi sumber konflik di masyarakat.

Sebelum pergaulan luas seperti dewasa ini, pergaulan sesama warga berlangsung dalam hubungan yang akrab dan personal atas dasar nilai kebersamaan, hal tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Warga masyarakat mempunyai orientasi nilai dan kepentingan yang sama. Kebersamaan mereka diungkapkan dengan menggunakan istilah "kita" yang menunjukkan adanya kesatuan dan tidak ada lagi yang lainnya di dalam masyarakat itu. Kebersamaan dan kesatuan di dalam masyarakat tercermin pula dalam ketaatan warga masyarakat terhadap *awig-awig* (praturan) yang mereka tetapkan bersama dan dalam hal bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadapnya, umumnya *awig-awig* sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan efektif. Selain itu, segala keputusan yang diambil masyarakat dalam hal terjadinya konflik umumnya ditaati demi kebersamaan dan kesatuan dalam masyarakat. Peruntukan tanah dan perolehan hak atas tanah di masyarakat diatur juga menurut adat setempat berdasarkan otonomi asli yang dimiliki oleh masyarakat Desa adat. Oleh karena peruntukan tanah umumnya homogen untuk tanah pertanian dan hanya bagi anggota masyarakat setempat umumnya jarang menimbulkan konflik dan kalaupun ada konflik umumnya dapat ditangani melalui lembaga penyelesaian konflik.

Setelah masyarakat bergaul secara luas, warga masyarakat tidak saja bergaul dengan sesama warga masyarakat setempat, tetapi juga dengan masyarakat kota,

luar daerah dan bahkan juga dengan masyarakat internasional, terutama dalam kaitannya dengan pariwisata. Dalam pergaulan demikian, hubungan yang sangat akrab mulai melonggar, sifat personal berubah ke impersonal, nilai kebersamaman yang sebelumnya melandasi pergaulan antar wargapun melemah dan berubah ke arah individual, nilai tolong-menolong dan gotong-royong yang sebelumnya mewarnai segala macam aktivitas dalam masyarakat kini telah bergeser ke arah komersial denga perhitungan untung rugi. Dalam bersikap dan bertindak, warga masyarakat mengikuti norma dan orientasi nilai yang berbeda-beda. Selain itu warga masyarakat juga mempunyai kepentingan yang berbeda-beda terhadap peruntukan tanah.

Konflik berkepanjangan yang sering tidak dapat diselesaikan di masyarakat, merupakan suatu indikator bahwa lembaga adat, khususnya lembaga penyelesaian konflik adat yang keberadaannya masih diakui ternyata eksistensinya tidak diikuti oleh keberadaannya.

Desa adat menampakkan dirinya sebagai suatu organisasi kemasyarakatan dan sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintahan yang berdiri sendiri di wilayah Kecamatan. Desa adat adalah desa yang otonom sehingga mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya sendiri. Dalam perkembangan lebih lanjut otonomi itu hanya bersifat sosial religious dan sosial kemasyarakatan. Desa adat memiliki struktur kepengurusan yang pada umumnya disebut *Prajuru* dan dibeberapa desa di pegunungan umumnya disebut Dulu atau *paduluan* dan berfungsi untuk membantu tercapainya kepentingan para anggotanya secara maksimal, terutama sekali menyangkut kebutuhan dasar sebagai manusia (terpenuhinya kebutuhan hidup termasuk rasa aman dan nyaman).

Tentang *Prajuru* atau Dulu atau *Paduluan* ini umumnya dipilih secara demokratis (musyawarah mufakat) oleh masing-masing *Krama*, namun di beberapa desa adat yang lebih tua, pengurus tersebut ditugaskan secara bergiliran dari yang lebih tua, digantikan nantinya oleh yang lebih muda, dilihat dari ketika mereka ikut sebagai *Sekehe Taruna* atau *Matruna* (*Truna Nyoman*). Unsur-unsur *Prajuru* Desa adatpun bervariasi, dengan pemimpin tertinggi umumnya disebut *Bendesa* atau *Kelihan Desa*, sedang wakil, sekretaris dan pembantu disebut dengan berbagai nama, seperti *Patajuh* (wakil), *Panyarikan* (sekretaris), *Kasinoman* (pembantu atau juru arah) dan *Sedahan* untuk bendahara. Dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa adat dilengkapi dengan kekuasaan mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingan dapat dipertemukan dalam suasana yang menjamin rasa aman bagi setiap warganya. Mengenai kekuasaan Desa adat dapat dibedakan menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat seluruh warganya, guna menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tenteram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dan disepakati dalam rapat desa (*paruman* atau *Sangkepan*), seperti upaya menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Mewujudkan hubungan yang harmonis antar sesama warga, dengan lingkungan alam dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai perwujudan ajaran *Tri Hita Karana*.

2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat keagamaan, sosial budaya, ekonomi dan hankam, seperti membina dan mengembangkan nilai-nilai agama Hindu, mengembangkan kebudayaan, memelihara dan melestarikan adat-istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa, mengembangkan ekonomi kerakyatan, memelihara kelestraian *Kahyangan Tiga*, mewujudkan pertahanan dan keamanan bersama dalam menghadapi kondisi tertentu.
3. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa, kasus atau konflik, karena berbagai hal seperti kepentingan yang bertentangan, tidak yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, perbuatan yang mengganggu ketertiban warga, dll., yang umumnya ditempuh melalui perdamaian maupun sanksi adat (I Made Widnyana, 1999: 4).

Sesuai dengan hakekat pengertian otonomi desa sebagai kekuasaan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, maka jelaslah bagi kita bahwa pelaksanaan kekuasaan seperti tersebut berlaku di wilayah desa yang bersangkutan. Selain mengikuti asas personalitet, khususnya terhadap warga desa (pangrep), yang karena suatu hal berada di luar desa nya, namun masih tetap menjalin ikatan dengan desa asalnya.

- a. Berkennaan dengan setiap warga desa adat wajib menjunjung kekuasaan yang telah disepakati dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan tenram seperti yang dicita-citakan, maka bentuk konkret otonomi Desa adat dapat dilihat pada : *Bendesa (Kelihan)* Desa adat. Dalam struktur pengurus Desa adat, *Bendesa* atau *Kelihan Desa* memiliki posisi sentral dan utama, sebagai orang yang dituakan oleh masyarakat (*primus interpares*). Dengan demikian *Bendesa (Kelihan)* Desa adat memiliki kharisma atau wibawa di lingkungan desa nya.
- b. *Paruman (Sangkepan)* Desa adat. *Paruman* atau *Sangkepan* Desa adat adalah bentuk musyawarah yang sangat demokratis (demokrasi asli), karena setiap *Krama* (warga) Desa adat memiliki hak suara yang sama. *Paruman* umumnya membahas hal-hal yang dianggap perlu dan biasa diselenggarakan secara rutin (*nityakala*) atau juga insidental (padgatakala).
- c. *Awig-awig* Desa adat. *Awig-awig* adalah aturan-aturan yang dibuat oleh *Krama desa* melalui *Paruman* Desa adat dan umumnya banyak yang tidak disuratkan. Namun karena perkembangan, dewasa ini telah berhasil disuratkan *awig-awig* tersebut sebagai pedoman bagi pengurus Desa adat dalam melaksanakan kewajibannya maupun bagi warga, dan di dalam *awig-awig* tersebut kita jumpai sanksi-sanksi bagi warga desa yang melanggarinya. Di dalam *awig-awig* desa ini dapat dilihat perbuatan atau tindakan yang dilarang serta sanksi-sanksinya baik sanksi itu dijatuhkan kepada warga atau keluarganya atau dibebankan kepada masyarakat desa sendiri (I Made Widnyana, 1999: 5).

Dalam operasionalnya, Desa adat senantiasa mandiri sebagai wujud dari otonomi, karena tidak ada intervensi darimanapun yang dapat dibenarkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warganya. Desa adat dengan *Banjar-Banjarnya*

adalah lembaga masyarakat umat Hindu sepenuhnya berdasarkan keagamaan. Secara nyata dasar keagamaan itu dapat dilihat pada *Kahyangan Tiga* dan upacara-upacara agama yang berlangsung di Desa adat seperti upacara *Tawur Kesanga*, *Usabha* Desa dan lain-lain, Agama Hindu menjiwai dan meresapi segala kegiatan *Krama desa*.

Demikian pula bila kita mengkaji ajaran agama tentang upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan hidup serta membina hubungan harmonis antara manusia yang kemudian kita kenal dengan *Tri Hita Karana*, maka jelaslah Desa adat tidak saja merupakan persekutuan teritorial dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat, tetapi juga merupakan persekutuan dalam kesamaan agama dalam memuja Tuhan Yang Maha Esa. Perpaduan ketiga unsur-unsur *Tri Hita Karana*, yakni antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Diwujudkan dengan mendirikan pura *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan-Kahyangan* Desa. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesama manusia yang bertempat tinggal sama dalam suatu desa melalui aturan yang berlaku sebagai anggota Desa adat atau *Krama desa* dan membina hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan dalam wilayah yang sama yakni wilayah Desa adat yakni dengan pemeliharaan bersama desa , fasilitas desa dan *Banjar* masing-masing dengan baik dengan Parareman atau *Pasangkepan* rutin. Dengan demikian *Tri Hita Karana*, yang menyebabkan kehidupan yang harmonis antara sesama warga Desa adat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup merupakan landasan bagi Desa adat.

Terhadap adanya kesatuan pandangan dalam kehidupan di Desa adat kemudian di Bali kita mengenal adigium yang merupakan azas dari kebersamaan, yakni : *Salulung Sabyayantaka* (sa + luhung + luhung sa + byaya (sa) + antaka) yang artinya sehidup semati atau dalam istilah Bali di sebut Beriuk Seguluk artinya sehidup senasib dan sepenanggungan. Atas dasar azas kebersamaan ini hendaknya setiap anggota Desa adat merupakan bagian dari keluarga besar Desa adat termasuk masalah kesejahteraan warganya. Bila hal ini dipahami dan dilaksanakan dengan baik, maka tidak terjadi warga umat Hindu sampai dipelihara di panti-panti asuhan yang tidak bernaafaskan Hindu. Memperhatikan landasan dan tujuan hidup manusia menurut ajaran Hindu, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang sejati, maka fungsi Desa adat yang paling menonjol bagi warga atau *Krama*-nya, adalah untuk bersama-sama meringankan beban kehidupan baik suka dan duka (dalam Pasuka-dukan Desa).

Bila Desa adat mampu melaksanakan fungsi dan peranannya, maka tujuan Desa adat untuk mewujudkan desa yang Sukertagama (masyarakat tentram karena melaksanakan ajaran agama), Tata Tentram Kertaraharja (tentram dan sejahtera) akan dapat diwujudkan untuk itu para *Prajuru* Desa hendaknya senantiasa mencari upaya dengan mengkaji potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa adat termasuk sumberdaya manusia SDMnya untuk dapat di kembangkan sebaik-baiknya. *Sabha-Sabha* Desa (Musyawarah Desa) atau *Sangkepan* (sidang-sidang) dan *Paruman* Desa (rapat desa) hendaknya diadakan secara rutin dengan memasukkan teknologi dan manajemen modern dalam mengurus Desa adat adalah sangat mutlak, sepanjang management modern itu mendukung pelaksanaan ajaran agama Hindu.

Desa Adat dan Pariwisata Budaya

Disadari bahwa pranata sosial yang bersifat tradisional dalam masyarakat Bali selalu berhasil menunjukkan kemampuannya, bukan hanya dalam hal menyelenggarakan pola hidup yang berkaitan dengan masalah tradisi tapi juga mengembangkan paham-paham kemajuan. Dia nyaris menjadi tangan-tangan pembangunan yang sangat andal, termasuk desa adat mempunyai kontribusi besar terhadap keberhasilan pembangunan Bali. Kinerja dari perekonomian Bali dalam 25 tahun terakhir ini baik dalam artian sistem, struktur dan prestasinya merupakan wujud nyata dari sumbangan masyarakat Bali dalam pembangunan ekonomi bangsanya. Keberhasilan dalam program pembangunan seperti : manajemen pertanian dengan sistem subaknya, pembangunan industri kecil, industri, pariwisata budaya, keluarga berencana, pengembangan budaya pertunjukan, merupakan buktinya. Terpilihnya Bali sebagai daerah tujuan wisata utama dunia, sangat membantu memperbaiki citra Indonesia di luar negeri tidak saja sebatas budaya, tetapi juga citra politik dan ekonomi.

Namun demikian, dari hari penelitian beberapa pakar menunjukkan bahwa hubungan timbal balik, hubungan memberi dan menerima (*reciprocity*) masih bersifat asirnetris. Artinya, lembaga tradisional termasuk desa adat sudah banyak mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor, sementara sektor-sektor tersebut belum memberikan dukungan langsung terhadap pemberdayaan desa adat. Misalnya kepariwisataan, yang dengan konsep pariwisata budaya belum juga nampak memberikan sumbangan yang langgsung terhadap pembangunan desa adat. Desa adat baru berperan sebagai objek dalam pembangunan kepariwisataan (Pitara, 1998).

Proses interaksi antara pariwisata dan kebudayaan merupakan peluang dan tantangan bagi desa adat dan masyarakat Bali. Interaksi yang diharapkan adalah, di satu pihak pariwisata dapat berkembang dengan bertumpu pada sektor budaya, di lain pihak desa adat sebagai pilar penyangga kebudayaan merupakan kesempatan ekonomis yang diharapkan oleh warganya.

Desa adat dengan dasar filosifis *Tri Hita Karana*, sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk bergerak dalam bidang ekonomi dengan pelembagaan secara formal wadah ekonomi pedesaan yang disebut LPD (Lembaga Perkreditan Desa), lembaga ini telah berkembang dengan sangat baik dan secara nyata mampu berperan positif dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Lembaga ini perlu didukung dan diperkuat agar keberadaannya tidak terdesak oleh perkembangan Bank-bank besar.

Pada beberapa desa adat di Bali kita melihat sudah ada kemampuan mengadaptasi produk-produk kebudayaan untuk kepentingan pariwisata telah meliputi banyak bidang, seperti seni pertunjukan, kerajinan, industri kecil, hias dan dekorasi, masak, busana, bangunan dan sebagainya. Keadaan itu merupakan gambaran kemajuan-kemajuan yang dicapai masyarakat. Produk-produk kebudayaan yang dikelola oleh Desa adat ini perlu terus dikembangkan dan diperkuat dan jangan sampai diserobot oleh pihak-pihak luar desa adat yang bermodal besar. Dewasa ini dimana negeri kita sedang dilanda krisis ekonomi, industri kecil, kerajinan yang ada di Desa-desa ada telah menjadi penyelamat perekonomian Bali dari keterpurukan.

Di masa-masa mendatang desa adat perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan badan usaha sendiri seperti pengelolaan pasar (pasar seni, pasar buah, pasar sayur) sebagai pengumpul hasil kerajinan dan hasil bumi di desa adat. Pasar-pasar tradisional yang telah ada perlu diperkuat agar jangan didesak oleh pasar-pasar swalayan, atau diambil alih pengelolaannya oleh dinas. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa hasil dari retribusi pasar yang dikelola oleh desa adat dimanfaatkan untuk pembangunan desa adat, rehabilitasi tempat suci, upacara agama dan lain-lain.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh desa adat seperti hujan, air, sungai yang secara turun temurun telah dipelihara, dikelola desa adat agar terus diperkuat dan jangan ada usaha untuk mengambil alih aset itu untuk tujuan dan alasan yang dicari-cari.

Eksistensi desa adat ke dalam kegiatan ekonomi seperti disebut di atas adalah sangat positif, karena secara nyata dapat mengurangi beban *Krama desa* dalam pendanaan kgiatan desa, disamping kegiatan ekonomi itu akan menunjang kegiatan aktivitas-aktivitas budaya di Desa Adat, dan sekaligus diharapkan nantinya Desa Adat itu bisa mandiri, dan berwenang mengelola otonomi secara lebih mengesankan. Pada sektor-sektor ekonomi inilah sebenarnya kegiatan pariwisata bisa mengembangkan hubungannya dengan lebih mengesankan dan langsung dengan desa adat. Apalagi paradigma pembangunan yang dikembangkan sekarang memang sudah mengarah kepada pembangunan ekonomi kerakyatan dan untuk rakyat, maka pilihan selanjutnya di dalam pengembangan kawasan pariwisata tentunya kepada kawasan pariwisata terbuka. Apabila hal ini bisa diwujudkan pada semua desa adat di Bali maka kami mempunyai keyakinan bahwa Bali akan tetap menjadi provinsi terbaik di Indonesia, karena desa adatnya mampu membangun pembangunan spiritual. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pariwisata budaya Bali akan tetap jaya sepanjang zaman.

Memperhatikan pengertian, azas dan tujuan Pariwisata Budaya seperti di atas, kiranya telah cukup bagi kita untuk memahami pengertian pariwisata budaya yang telah dan kini terus menerus dikembangkan. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Propinsi Bali telah menunjukkan keberhasilan dalam menunjang berbagai bidang kehidupan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan lima tahunan daerah. Kita telah merasakan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan telah menunjukkan keberhasilan baik di tingkat nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi Bali cukup tinggi (melebihi pertumbuhan rata-rata nasonal) bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, dalam situasi krisis ekonomi dan moneter saat ini. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hubungan ini pemerintah berkewajiban untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta menciptakan iklim yang mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tampaknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Bali tidak perlu diragukan lagi untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Walaupun demikian diperlukan untuk melihat rahasia keberhasilannya dalam rangka pengembangannya pada PJP II yang memiliki ciri pembangunan tersendiri, yaitu ciri pembangunan

yang penuh dengan kemandirian. bahwa Tingkat partisipasi masyarakat di Bali dalam program-program pembangunan termasuk kategori partisipasi tinggi. Yang dimaksud dengan partisipasi dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, keterlibatan dalam menyumbangkan masukan, baik tenaga, uang maupun material, hingga keterlibatan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Berbagai kasus muncul (dalam kaitannya dengan kepariwisataan), seperti dinyatakan oleh beberapa pakar, adalah karena kurangnya koordinasi dan komunikasi atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah sosialisasi program (proyek) sejak perencanaan sampai pada pelaksanaan. Di samping itu, bahwa pengawasan dari masyarakat sangat lemah, sering masyarakat mudah terbujuk oleh investor yang membeli tanah-tanah mereka dengan harga yang mahal. Kasus-kasus tanah juga merebak dalam kaitannya dengan alih fungsi atau dijualnya tanah-tanah *labapura* dan *ayahan* desa, yang bila tidak dicermati akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

Permasalahan lainnya adalah penyalah gunaan simbol-simbol Hinduisme (agama Hindu), seperti bangunan yang mirip tempat pemujaan, canang sari (tidak ditempatkan semestinya), canang sari masasari bola golf, penempatan "*barong*" pada bangunan planet Bali, dan lain-lain, bila tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan ketersinggungan umat Hindu di daerah ini yang dampaknya tentu akan merusak citra Pariwisata Budaya yang tengah dan terus dikembangkan. Demikian pula masalah kependudukan yang cukup memberikan beban yang berat karena kepadatan penduduk, bila tidak dikaji dengan baik akan mengancam eksistensi kebijaksanaan pariwisata yang berkelanjutan.

Karena Bali bukanlah bagian bagian terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka pengembangan pariwisata Nusantara juga perlu mendapatkan prioritas. Pengembangan pariwisata Nusantara dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, terutama dalam bentuk penggalakkan pariwisata remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan. Sedangkan daya tarik Bali, sebagai komponen tidak terpisahkan dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Budaya Bali, perlu ditingkatkan melalui pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai agama Hindu serta upaya pemeliharaan kebudayaan daerah yang mencerminkan ketinggian budaya dan kebesaran bangsa, serta didukung dengan promosi yang memadai.

Era Kesejahteraan

Pembinaan Desa Adat dalam menghadapi era kesejagatan harus dikembalikan pada landasan filosofisnya sebagai wadah pengalaman *Asrama Dharma* dan *Varna Dharma*. Konsepsi hidup berdasarkan *Asrama* dan *Varna* untuk mewujudkan empat tujuan hidup adalah suatu konsepsi yang universal. Desa Adat jangan hanya dijadikan wadah untuk mempertahankan tradisi secara membabi buta. Mahatma Gandhi pernah mengatakan berenang di lautan tradisi adalah suatu kenikmatan namun menyelam dilautan tradisi adalah suatu kekonyolan. Gandhi juga mengatakan Hindu harus selalu diremajakan. Hal ini sangat sejalan dengan konsepsi penerangan *Dharma* agar selalu sukses sebagaimana disebutkan dalam

kitab *Manawa Dharmasastra* VII, 10. Dalam kitab tersebut ditegaskan bahwa agar *Dharma* selalu sukses hendaknya diterapkan berdasarkan lima pertimbangan yaitu *Iksa, Sakti, Desa Kala* dan *Tattwa*, PHDI dalam pesamuan Agung tahun 1971 di Yogyakarta menetapkan bahwa dalam masyarakat Hindu ada tiga jenis tradisi. Ada tradisi yang merupakan pengalaman Agama, ada tradisi yang bukan pengalaman dengan ajaran Agama. Tradisi yang merupakan pelaksanaan Agama ada yang masih ajeg sesuai dengan konsepsinya ada yang sudah menyimpan dengan konsepsinya. Yang masih ajeg harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Yang sudah menyimpang harus secara bertahan dikembalikan agar sesuai dengan konsepsinya. Tradisi yang bukan merupakan pengalaman Agama namun menunjang harus terus dibina dan disesuaikan pula dengan tuntutan jaman. Sedangkan tradisi yang bertentangan dengan Agama harus direlakan untuk dihapus secara pelan-pelan dengan penuh kehati-hatian. Dalam meningkatkan pembinaan tradisi yang merupakan pengalaman Agama disamping membenahi tradisi beragama yang diamalkan di Desa Adat agar sesuai dengan konsep asalnya, harus ada juga harus diperkaya dengan penerapan konsep-konsep beragama berdasarkan *Weda* yang belum begitu dikenal oleh umat. Bahkan ada tradisi beragama yang benar-benar sangat luhur namun entah apa sebabnya bisa hilang dari tradisi.

Dalam membina umat Hindu, Desa Adat hendaknya dibina sesuai dengan konsep Desa Adat yang disebutkan dalam *Lontar Mpu Kuturan* yaitu sebagai wadah pembinaan *Catur Varna* dan *Catur Asrama*. Dari konsep inilah dikembangkan program-program pembinaan umat agar umat dapat semakin mandiri menapak kehidupan di dunia ini. Dalam Agastya Parwa disebutkan *Grhastrha Ngarania Yatha Sakti Kayika Dharma*. Artinya *Grhastrha* namanya orang yang dengan kemampuan sendiri mengamalkan *Dharma*. Pengertian *Dharma* disamping berarti Agama juga berarti kebenaran, kewajiban dan kebijakan, *Grhastrha* ini adalah *Krama Ngarep* dalam Desa Adat. *Krama Ngarep* adalah *krama* inti sebagai tulang punggung masyarakat itu sendiri. Kesiapan untuk mandiri ini disiapkan dalam *Asrama Brahmocari*. Desa adat dapat mengambil peran dalam pendidikan diluar sekolah untuk menunjang dan melengkapi pendidikan dalam sekolah. Pendidikan luar sekola yang diambil oleh Desa Adat adalah pendidikan yang dapat mengarahkan para *Krama Teruna Teruni* dapat mengembangkan minat dan bakat sehingga mereka itu dapat menjadi SDM yang siap memasuki lapangan kerja yang ada bahkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

Oleh karena itu, industri pariwisata tidak cukup dilihat dari bentuk pembinaan dan pembangunan hotel-hotel, jalan-jalan dan berbagai alat angkutan serta kemudahan lainnya, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial budaya, yaitu kehidupan adat istiadat yang dijawi oleh agama Hindu. Ini berarti pariwisata berdampak terhadap sosial budaya cukup besar. Dampak ini bisa dilihat yaitu: dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas termasuk tingkat ekonomi atau ketergantungannya, dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat, dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial, dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata, dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat, dampak terhadap pola pembagian kerja, dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial, dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan, dampak terhadap

meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial, dampak terhadap kesenian dan adat-istiadat Berbagai dampak negatif juga terjadi seperti *demonstration effect*, komoditisasi terhadap kebudayaan, penurunan kualitas hasil kesenian, profanisasi kesenian sakral, kegiatan ritual dan tempat suci.

Demikian juga dalam bidang pendidikan moral dan mental Desa Adat menyiapkan program-program untuk memberikan uamt latihan-latihan kerohanian untuk meningkatkan kwalitas moralnya dan daya tahan mentalnya dalam menghadapi berbagai godaan-godaan hidup. Ini berartinya Desa Adat tidaklah sebagai lembaga yang tugasnya hanya mengurus upacara Agama saja. Pendirian Lembaga Perkreditan Rakyat adalah lembaga yang menggerakkan *Artha* untuk kepentingan *Dharma* dan *Kama*. LPD pun harus digerakkan oleh *Dharma* dan *Kama* artinya ia digerakkan berdasarkan kebenaran (*Dharma*) dan keinginan/semangat yang mulia (*Karma*). Dana masyarakat yang terhimpun di LPD disamping diarahkan untuk menggerakkan usaha-usaha anggota karma Adat juga dapat dikembangkan untuk membangun badan Usaha Milik Desa Adat seperti pasar desa, pertokoan desa, Koperasi konsumsi, usaha peternakan, pengolahan hasil-hasil pertanian dll. Dalam mengembangkan berbagai programnya Desa adat dapat bekerjasama dengan berbagai badan atau perorangan untuk mensukseskan program tersebut. Kalau hal ini dapat dikembangkan maka tenaga-tenaga terdidik yang lahir di desa adat tersebut tidaklah seperti sekarang meninggalkan desanya mencari pekerjaan ditempati lain. Desa adat sebagai koordinator penyelenggara pelaksanaan Agama Hindu sebenarnya sudah memiliki tempat yang cukup memadai seperti Pura dengan *Jaba Tengah* dan *Jaba Sisinya*, *Wantilan* dan juga *Balai Banjar*. Umumnya Desa Adat memiliki sejumlah lahan sebagai *Labha Pura* dan *Karang Ayahan Desa*. Semua potensi tersebut dapat di dayagunakan untuk mengembangkan berbagai program. Baik program yang menyangkut *Dharma Artha* maupun yang menyangkut *Kama*. Demikian pula program yang menyangkut pengembangan teruna-teruni pembinaan para *Grahastha* dan para usia lanjut. Desa Adat yang didirikan oleh Sang *Catur Varna* ini artinya Desa Adat sebagai wadah pengembangan dan pembinaan potensi. Artinya jangan ada anggota *Krama* sama sekali tidak memiliki profesi meskipun profesi yang sangat sederhana sekalipun. Semua pihak yang membantu pembinaan Desa adat hendaknya jangan dikembangkan diluar konteks ini.

Kesimpulan

Desa Adat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat kemajuan pembangunan industri pariwisata, keluarga berencana, pengembangkan budaya pertunjukan merupakan bukti nyata peranan desa adat.

Dalam perkembangan iptek dan persiapan global dewasa ini diharapkan nantinya desa adat itu bisa mandiri, dan diberi tidak terbatas pada sosial-budaya-religius tetapi juga dalam bidang ekonomi. Apabila ini bisa diwujudkan ada semua desa adat di Bali maka kita mempunyai keyakinan bahwa Bali akan tetap menjadi provinsi terbaik di Indonesia, karena desa adat mampu membangun ekonomi, sosial, budaya dan tentunya yang terpenting adalah pembangunan spiritual.

Sebagai konsekuensi logi dari pembesaran nilai dan peranan desa adat khususnya dalam bidang ekonomi, maka itu perlu menyesuaikan diri dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tugas masing-masing, dalam hal ini peranan pariwisata diharapkan lebih mengesankan dan langsung secara riil ke desa adat.

Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijewali oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang di dalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang.

Desa adat sangat berperanan dalam pengembangan pariwisata budaya di daerah ini bilamana fungsi, peranan dan wewenang Desa adat dapat berjalan dengan baik. Pada Desa -Desa adat yang berkembang seni budaya dan kehidupan masyarakatnya sejahtera, fungsi, peranan dan wewenang Desa adat berjalan mantap.

Desa adat Bali mampu menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi ini bila potensi dan pemberdayaan Desa adat dapat sepanjang pelestarian kebudayaan Bali dan lingkungannya tetap dijaga keajegannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Adeney, Bernard T, 2000, *Etika Sosial Lintas Budaya*, Kanisius: Yogyakarta
- Ady, Nyoman Rutha, 2006, “Kuta Dulu dan Kini: Loloan pun Disulap Jadi Hotel”, naskah lengkap opini, Denpasar, Bali Post
- Agger, Ben, 2006, *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Ardika, I Wayan, 1999: *Pelestarian dan Pemanfaatan Tinggalan Arkeologi dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Bali*, artikel dalam Majalah Ilmiah Pariwisata, Volume 2, Tahun 1999, Penerbit: Program Studi Pariwisata Universitas Udayana.
- Ardika, I Wayan, 2001: *Pariwisata dan Pelestarian Warisan Budaya*, Makalah disampaikan pada Matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata Unud Tahun 2001/2002, Agustus 2002.
- _____, 2003, “Komponen Budaya Bali sebagai Daya Tarik Wisata”. I Wayan Ardika Penyunting. *Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global*, Denpasar, Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata Universitas Udayana.
-, 2006, “Prinsip Multikultural dan Implementasinya”, naskah lengkap Materi kuliah Anfulen, Denpasar, Universitas Udayana, 22-29 Agustus.
-, 2006, “Prinsip Multikultural dan Implementasinya”, Denpasar, materi kuliah Program S3 Univeristas Udayana.
-, 2006, “Cultural Linkages And Tourism Development Among Indonesia, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, and Vietnam”, naskah lengkap yang disampaikan dalam International Symposium Trail of Civilization, 28 Agustus: Yogyakarta.

- Ardika, I Gede, 2001: *Pembangunan Pariwisata Bali Berkelanjutan yang Berbasis Kerakyatan*, Makalah pada Seminar Nasional Bali, *The Last or The Lost Paradise*, di Denpasar, 1 Desember 2001.
- Atmaja, Bawa Nengah, 2001: *Aspek Sosiolultural dalam Pengembangan Wisata Alam*, Makalah disampaikan pada kegiatan Matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata UNUD Tahun 2001/2002, tanggal 22 Agustus 2001.
- Atmaja, Nengah Bawa, 2006, “Pemulihan Krisis Kebangsaan dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kajian Budaya”, makalah pada Seminar Nasional Program Kajian Budaya Universitas Udayana, di Denpasar, 18 Nopember.
- Bagus, I Gusti Ngurah, 2001. ‘Reformasi, Multikulturalisme, Dan Masalah Politik Bahasa di Indonesia’. Makalah disampaikan pada Kongres Bahasa Jawa III. Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa.
- Barker, Chris, 2005, *Cultural Studies* Teori dan Praktik, Yogyakarta : Bentang.
- Dherana, Tjokorda Raka, 1982: *Aspek Sosial Budaya dalam Kepariwisataan di Bali*, Penerbit: UP. Visva Vira Denpasar.
- Erawan, I Nyoman, 1999: *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Otonomi Daerah Menuju Peningkatan Kesejahteraan Rakyat*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “ Otonomisasi daerah yang Diperluas dalam rangka Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Mandiri”, Denpasar 9 April 1999.
-, 2001: *Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata*, Makalah disampaikan pada kegiatan Matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata UNUD Tahun 2001/2002, tanggal 20 Agustus 2001.
- Elashmawi, Farid & Philip R. Harris, 1998: *Multicultural Essential Cultural Insights For Global Business Success Management 2000*, Gulf Publishing Company Houston: Texas.
- Featherstone, Mike, 2001, *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gatner, William C., 1996: *Tourism Development, Principles, Processes, and Policies*, an International Thomson Publishing Company: London
- Giddens, Anthony, 2000, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Terjemahan Andry Kristiawan S dan Yustina Koen S, Jakarta: Gramedia
-, 2002, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, Terjemahan Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jenkins, Richard, 2004, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Koentjaraningrat, 2000. *Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Korn. V.E. 19323. *Het Adatect van Bali*. S-Gravenage : G. Naeff.
- Kleden, Ignas, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta : Gramedia
- Lastra, I Made, 1997, *Peraturan Kepariwisataan*, Denpasar: STP Nusa Dua
- Lubis, Akhyar Yusuf, 2004, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Bogor: Akademia

- Mantra, IB.1993. *Bali : Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar : Upada Sastra.
- Mantra, IB.1993. *Bali : Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar : Upada Sastra.
- Parimartha, I Gede 1998. *Desa Adat Bali Dulu dan Sekarang*, Paper disampaikan seminar desa diselenggarakan Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
- Pitana, I Gede 1997. *Internasionalisasi Desa Adat dan Baliniasi Budaya Global..* Paper disampaikan pada Lokal Karya Internasional Pelestarian Warisan Budaya Bali.
- Piliang, Yasraf Amir, 2004, Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetaphisika, Yogyakarta,: Jalasutra.
- Pitana, I Gde, 1994, Editor: *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar: BP, 1999, *Pelangi Pariwisata Bali*, Denpasar: BP, 2000: *Cultural Tourism In Bali, A Critical Appreciation*, Denpasar: Universitas Udayana Denpasar.
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu.G, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI Ratna Kutha, 2006, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Richards, Greg and Derek Hall, 2002, *Tourism and Sustainable Community Development*, London: Routledge
- Sulistyo, Hermawan (editor), 2002, *BOM BALI, Buku Putih Tidak Resmi Investigasi Teror Bom Bali*, Jakarta: Pusat Data CONCERN -324
- Sudibya I Gede 1995. *Peranan Umat Hindu dab Pembangunan Ekonomi*, dalam Moksartham Jagaddhita, Denpasar : Upada Sastra.
- Swarsi, Geriya dan I Wayan Geriya, 2003, "Nilai Dasar dan Nilai Instrumental dalam Keragaman Kearifan Lokal Daerah Bali", makalah Dialog Budaya, Denpasar: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Bali.
- Sirtha, I Nyoman, 2001, *Pariwisata dalam kaitannya dengan Sosiolultural Masyarakat Bali*, makalah disampaikan pada matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata Unud, Tahun 2001/2002, tanggal 11 Agustus 2001.
- Widnyana, I Made, 1998, *Pemberdayaan Lembaga Adat dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Paper disampaikan dalam seminar FH Unud.